

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah/provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstanta.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu alat ukur untuk melihat kondisi perekonomian di suatu wilayah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai penggerak sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Pasal 10 Ayat (5) Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Pasal 4 Ayat (4) Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah, (Yunarko, 2007).

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat

perkembangan penduduk dan pengalaman kerja yang menambah keterampilan dan keahlian kerja mereka.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala Provinsi atau kabupaten/kota.

Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 12 Kabupaten/Kota di Riau yang tidak terlepas dari usaha keras antara pemerintah dan masyarakat, namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Riau juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Riau harus mampu menghadapi tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana masing-masing daerah memiliki

kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Provinsi Riau memiliki 12 kota/kabupaten yang memiliki jumlah angka laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, provinsi Riau bisa dikatakan tidak stabil dimana di setiap daerah nya dan di setiap tahunnya angka pertumbuhan ekonomi berubah-ubah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode tahun 2012-2017 dari masing-masing kabupaten di wilayah Provinsi Riau dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode Tahun
2012-2017 Atas Dasar Harga Konstan

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan Singingi	5.39	5.47	5.14	-2.14	3.88	4.15
2.	Indragiri Hulu	8.39	6.21	5.53	-2.94	3.68	5.45
3.	Indragiri Hilir	7.91	7.17	6.88	2.04	4.84	8.59
4.	Pelalawan	3.02	5.55	6.2	2.46	2.96	6.17
5.	Siak	2.07	-2.33	-0.97	-0.21	0.35	11.19
6.	Kampar	5.82	6.31	3.43	1.09	2.8	10.06
7.	Rokan Hulu	6.12	5.99	6.5	1.98	4.94	4.36
8.	Bengkalis	-0.65	-3.27	-3.85	-2.74	-2.4	18.7
9.	RokanHilir	3.65	2.38	4.81	0.52	2.3	10.48
10.	Kepulauan Meranti	6.7	4.24	4.45	2.85	3.22	2.35
11.	Pekanbaru	7.82	5.59	6.9	5.57	5.96	14.25
12.	Dumai	3.66	3.68	2.69	1.91	4.64	4.26
	Rata-Rata	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23	8.33

Sumber : BPS Riau (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2012-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 3,76 persen tahun 2012 menjadi 2,23 persen pada tahun 2016 dan di tahun 2017 naik secara drastis menjadi 8,33 persen. Badan Pusat Statistik menyatakan ekonomi Provinsi Riau triwulan III-2016 tumbuh 2,23 persen, lebih baik dibandingkan capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,22 persen.

Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan investasi) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Pandangan teori ini didasarkan pada analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya.

Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, investasi, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2016). Pertambahan penduduk atau pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar berarti tenaga kerja yang tersedia juga semakin besar.

Dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka ini yang akan berpengaruh terhadap tingkat output dalam perekonomian. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

Selain itu jumlah penduduk yang besar juga akan mempengaruhi luas pasar yang akan menampung barang dan jasa yang dihasilkan. Hal tersebut selanjutnya akan sangat mendorong nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, pertumbuhan penduduk yang besar tersebut harus diimbangi dengan kualitas penduduknya. Jika jumlah penduduk yang ada tidak diimbangi dengan kualitas penduduknya ini justru akan menjadi beban bagi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi akan melambat jika jumlah tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan. Kualitas penduduk dalam hal ini tenaga kerja harus ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Pada tahun 2017, Penduduk Indonesia terdiri dari 128,06 juta jiwa angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 66,67 persen sedangkan Provinsi Riau terdiri dari 2,97 juta jiwa angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 64,00 persen.

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Provinsi Riau masih berada di bawah TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja secara nasional. Jika dilihat per kabupaten/kota, TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) tertinggi terdapat pada Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 68,06 persen sedangkan TPAK terendah terdapat pada Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 60,63 persen.

Tabel 1. 2

Jumlah Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau Tahun
2008-2017

No	Tahun	JumlahPendudukUsia Kerja	Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1	2008	3.564.090	62,83	8,20
2	2009	3.641.877	62,08	8,56
3	2010	3.734.841	63,66	8,72
4	2011	3.893.354	63,21	6,09
5	2012	4.013.974	62,52	4,37
6	2013	4.135.186	63,44	5,48
7	2014	4.257.120	63,31	6,56
8	2015	4.383.550	63,22	7,83
9	2016	4.509.908	66,25	7,43
10	2017	4.634.041	64,00	6,22

Sumber : BPS Riau (2018)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 3.564.090 jiwa menjadi 4.634.041 jiwa pada tahun 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 62,83 persen menjadi 64,00 persen pada tahun 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 8,20 menjadi 6,22 persen.

Selain tenaga kerja yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah terdapat satu faktor lain yang tidak kalah penting yaitu peran serta pemerintah. Peran pemerintah sangat penting untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengendalikan kestabilan ekonomi serta meningkatkan perekonomian daerahnya.

Dalam teori determinasi pendapatan nasional pemerintah memiliki peran dalam bentuk pengeluaran pemerintah (*government ex-penditure*) dan penerimaan (*tax*). Pengeluaran maupun penerimaan pemerintah ini diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah Provinsi Riau terus meningkat setiap tahunnya.

Pendapatan yang diperoleh pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan dalam bentuk pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung baik juga untuk pengeluaran bisa dari penjualan baik penjualan langsung maupun penjualan tak langsung suatu daerah. Pengeluaran pemerintah tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1. 3

PDRB Kabupaten/Kota Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (milyar Rupiah)

No.	Kabupaten /Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kuantan singing	21.476,72	24.021,74	25.194,88	27.520,61	29.517,01
2.	Indragiri Hulu	29.872,28	33.762,48	34.583,59	37.031,2	38.738,28
3.	Indragiri Hilir	41.437,78	47.821,68	51.800,09	57.385,16	61.076,64
4.	Pelalawan	31.018,73	35.401,16	38.176,43	41.165,59	43.862,11
5.	Siak	82.129,72	85.735,52	77.235,57	78.943,50	79.613,19
6.	Kampar	61.515,51	68.816,91	66.285,16	69.674,66	71.589,98
7.	Rokan Hulu	21.645,41	25.355,42	26.907,16	29.130,67	31.037,81
8.	Bengkalis	156.624,44	165.899,04	135.504,92	132.314,26	133.035,53
9.	Rokan Hilir	65.200,09	74.545,55	70.692,97	73.359,60	74.551,55
10.	Kep. Meranti	13.100,96	15.127,12	15.151,63	16.044,43	16.731,42
11.	Pekanbaru	60.492,46	73.841,22	83.663,98	92.380,25	101.343,86
12.	Dumai	21.231,77	23.628,46	25.453,57	27.975,39	30.304,35
13.	Jumlah	605.745,88	673.956,31	650.649,97	682.925,35	711.401,74
	Provinsi Riau	607.498,45	679.395,86	652.761,63	682.290,50	705.678,59

Sumber : BPS Riau (2018)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa pengeluaran pemerintah provinsi Riau dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pengeluaran tahun 2013 sebesar 607.498.449,77 dan pada tahun 2017 sebesar 705.678.594,41 yang berarti terjadi kenaikan pengeluaran sebesar 98.180.144,64 atau sebesar (16,16%).

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012).

Bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta dan investasi oleh pihak luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta lebih dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sedangkan investasi dari pihak luar negeri dikenal dengan sebutan PMA (Penanaman Modal Asing). Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Penggunaan modal asing memang memberikan peranan yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi akan tetapi dalam jangka panjang ketergantungan terhadap penggunaan modal asing akan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar

keuntungan dari penggunaan modal asing biasanya hanya dinikmati oleh pihak asing. Selain itu kehadiran investor asing akan berdampak buruk bagi investor dalam negeri yang memiliki usaha yang sejenis karena biasanya investor dalam negeri kurang mampu bersaing dari segi penggunaan teknologi. Oleh karena itu sebaiknya pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kemampuan modal dalam negeri.

Menurut Puspita (2006) penggunaan modal asing harus hanya bersifat merangsang dan membantu kekuatan modal dalam negeri. Apabila kemampuan modal dalam negeri dianggap sudah mampu menunjang pembangunan ekonomi sebaiknya penggunaan modal asing semakin dikurangi.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2018

Gambar 1. 1

Perkembangan Target dan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Provinsi Riau tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas diketahui bahwa realisasi investasi di provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 17,18 Triliun menjadi 25,02 triliun pada tahun 2017 lebih besar dari target yang diinginkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa investasi di provinsi mengalami peningkatan secara fluktuatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2013-2017”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan membuat pembatasan masalah agar penelitian dapat lebih terarah dan fokus. Sehingga dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di beberapa Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau dengan 12 Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kep. Meranti, Kota Dumai dan Pekanbaru.
2. Variabel yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Investasi.
3. Penelitian mengambil perbandingan data tahun 2013-2017.

C. Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus bidang pembangunan lebih diletakkan di daerah Kabupaten/Kota sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB. Oleh karena itu mengkaji pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Beberapa faktor yang nampak nya berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau adalah faktor pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja dan realisasi nilai investasi,.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

2. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.
3. Menganalisis pengaruh nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

2. Bagi Pemerintah

Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan baru untuk dibaca serta dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan.